



**MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM ANALISIS PENGEMBANGAN  
POTENSI PARIWISATA BERBASIS *INDIGENOUS TOURISM***

Oleh

Mochamad Rozikin<sup>1)</sup>, Rendra Eko Wismanu<sup>2)</sup> & Andhyka Muttaqin<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Brawijaya

Email: <sup>1</sup>[mail.rozikin@yahoo.com](mailto:mail.rozikin@yahoo.com), <sup>2</sup>[rendra\\_eko\\_wismanu@yahoo.com](mailto:rendra_eko_wismanu@yahoo.com) &  
<sup>3</sup>[andhyka21@gmail.com](mailto:andhyka21@gmail.com)

**Abstrak**

Pengembangan sektor pariwisata telah menjadi prioritas pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah. Potensi daerah dibidang pariwisata yang menjadi perhatian bagi pemerintah saat ini yaitu lebih pada potensi kekayaan alam, kekayaan ragam kuliner, pertumbuhan wisata buatan, penguatan wisata budaya dan kearifan lokal. Potensi wisata unggulan tersebut masih memiliki bentuk lain jenis pariwisata yang dapat dikembangkan. Bentuk dan jenis potensi wisata yang beranekaragam ini dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik, melalui kolaborasi atau kerjasama oleh semua pihak atau dengan kata lain melalui *Collaborative Governance*. Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, pelaku swasta, pihak akademis, Non Governmental Organization (NGO) dan lain sebagainya, merupakan kekuatan dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada. Pada saat ini banyak negara telah berupaya mengemas pariwisata yang dapat memberikan perbedaan dan daya saing yang kuat terhadap negara-negara lain, yaitu melalui dasar pola pengembangan pada sektor budaya dan kearifan lokal. Pengembangan pariwisata berbasis pada budaya dan kearifan lokal ini dengan kata lain dapat disebut dengan pengembangan pariwisata berbasis *Indigenous Tourism*. Pengembangan potensi pariwisata daerah yang berbasis pada *indgenous tourism* merupakan pilihan baik dalam meningkatkan daya saing disisi dimensi nilai pada konsep *governance*, hal ini yang menjadi dasar mengenai model *collaborative governance* dalam analisis pengembangan potensi pariwisata berbasis *indigenous tourism*.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance*, NGO, Potensi & *Indigenous Tourism*

**PENDAHULUAN**

Salah satu strategi atau upaya pengembangan yang dilakukan oleh negara, pemerintah daerah, maupun masyarakat dalam sektor swasta yaitu melalui upaya promosi pariwisata dengan berbasis pada pengembangan di sektor masing-masing yang menjadi unggulan atau potensi pariwisata yang ada. Misal menurut Pendit (1994), pariwisata dapat dibedakan menurut motif wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Adapun jenis-jenis pariwisata menurut beberapa sumber seperti :

1. Wisata budaya
2. Wisata petualang
3. Wisata maritim atau bahari
4. Wisata industri
5. Wisata cagar alam (taman konservasi)
6. Wisata konvensi

7. Wisata pertanian (agrowisata)
8. Wisata berburu
9. Wisata kesehatan
10. Wisata olahraga
11. Wisata religi
12. Wisata komersial
13. Wisata politik
14. Wisata kuliner.

Industri pariwisata apabila ditinjau dari segi budaya, secara tidak langsung memberikan peran penting bagi perkembangan budaya Indonesia karena dengan adanya suatu objek wisata maka dapat memperkenalkan keragaman budaya yang dimiliki suatu negara seperti kesenian tradisional, upacara-upacara agama atau adat yang menarik perhatian wisatawan asing dan wisatawan Indonesia. Industri pariwisata yang berkembang dengan pesat memberikan pemahaman dan



.....  
 pengertian antar budaya melalui interaksi pengunjung wisata (turis) dengan masyarakat lokal tempat daerah wisata tersebut berada. Hal tersebut menjadikan para wisatawan dapat mengenal dan menghargai budaya masyarakat setempat dan juga memahami latar belakang kebudayaan lokal yang dianut oleh masyarakat tersebut (Spillane, 1994).

Kearifan local (*Local indigenous*) adalah seperangkat pengetahuan dan praktik-praktik baik yang berasal dari generasi-generasi sebelumnya maupun dari pengalaman berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya milik suatu komunitas di suatu tempat, yang digunakan untuk menyelesaikan baik dan benar berbagai persoalan dan atau kesulitan yang dihadapi. Kearifan lokal (*Local indigenous*) berasal dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang secara alami terbentuk dalam suatu kelompok masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar (Vitasurya, 2016). Kearifan lokal (*Local indigenous*) menjadi suatu ciri khas masing-masing daerah yang berpotensi untuk mendukung pengembangan suatu daerah.

Potensi budaya dan kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata menjadi bagian dari produk kreativitas manusia yang memiliki nilai ekonomi yang salah satu upaya tersebut melalui pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal (*Local indigenous*) atau dengan istilah lain dapat disebut sebagai *indigenous tourism*.

## LANDASAN TEORI

### *Governance*

Neo dan Chen (2007:7) menjelaskan bahwa *governance* merupakan hubungan antara pemerintah dan masyarakat sehingga mampu menciptakan formulasi kebijakan public setelah itu diimplementasikan dan evaluasi. Dalam arti luasnya, *governance* akan membahas mengenai peraturan, institusi, dan jejaring yang menjelaskan bagaimana fungsi dari suatu organisasi tersebut.

Penggunaan teori *governance* memiliki tiga dimensi Dwiyanto, Noerhaeni (2010: 25-26)

dimensi pertama mengenai kelembagaan yang mendeskripsikan *governance* sebagai sebuah sistem yang melibatkan banyak stakeholder, dari pemerintah maupun swasta untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan untuk menanggapi masalah dan kebutuhan publik. Dimensi kedua, merupakan nilai yang dijadikan dasar pada saat pengemabilan keputusan. Nilai administrasi public yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan sebagai contohnya efisiensi dan efektifitas telah beralih menjadi nilai sosial, kebebasan dan kemanusiaan. Dimensi ketiga menjelaskan tentang proses bagaimana unsur dan lembaga pemerintah memberikan respon terhadap berbagai masalah publik yang ada pada lingkungannya.

Sehingga *governance* merupakan suatu cara untuk mengelola dari ekonomi suatu negara dan sumber daya sosial yang ada dengan mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang nantinya tercipta kebijakan untuk di implementasi dan dievaluasi sehingga terdapat interaksi yang harmonis antara pemerintah, masyarakat dan privat. Definisi *governance* ini melahirkan istilah *good governance* yang artinya memastikan penghormatan untuk hak asasi manusia dan *the rule of the law*; menguatkan demokrasi; mengedepankan transparansi dan kapasitas dalam administrasi public. Penghormatan ini ditunjukkan dengan mengajak dan keikutsertaan individu yang efektif dapat memastikan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan legitimasi, yaitu tata kelola yang baik selama melaksanakan program pengembangan yang berdampak pada masyarakat lokal (Sirker dan Cosic, 2007; Sullivan, 2001).

### *Collaborative Governance*

*Collaborative governance* menjelaskan bahwa manajer dan perwakilan publik yang bekerja di lembaga pemerintah daerah perlu mengembangkan pendekatan berorientasi pelanggan untuk memberikan layanan (Jones et al., 2007; Navarra dan Cornford, 2005). Mereka membutuhkan ide yang jelas tentang niat pemerintahan baru (Kanat dan Ozkan, 2009) dan apa yang mereka lakukan dalam mencapai

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



pemerintahan baru itu (Hope, 2009; Jones et al. , 2007). Di ujung lain, masyarakat lokal perlu maju untuk berbagi pengetahuan dan keprihatinan dengan manajer publik dan perwakilan untuk mengembangkan upaya holistik untuk mencapai hasil terbaik dari proyek pengembangan (Bozeman, 2002; Dollery, 2003; Geddes, 2005). Warga perlu konsepsi yang jelas tentang peran mereka dalam urusan pemerintah daerah, yang akibatnya akan membantu mereka menjadi lebih berdaya untuk berpartisipasi dalam lokal program pengembangan (Macintosh dan Whyte, 2008; Mahmud, 2004; Stoker, 2006).

Cara untuk memperjelas konsep tentang peran masyarakat di urusan pemerintah daerah dengan melakukan collaborative governance. Cohen dan Munoz ( 2016); Reinhold dan Dolnicar (2018) anggota aktif dari jejaring tersebut terlibat dalam pembuatan kebijakan, struktur dan pembuatan keputusan untuk *sharing economy platforms*. Jaringan dibangun di atas minat, nilai, dan kepercayaan yang sama. Hartley et al. (2013) telah menciptakan istilah 'tata kelola kolaboratif' untuk menyoroti keterlibatan multi-aktor di seluruh organisasi sebagai yang layak alternatif atau tambahan untuk koordinasi dengan persaingan pasar dan solusi hierarkis. Tata kelola kolaboratif melampaui batas dalam fokus pada apa yang terjadi di dalam organisasi tertentu ke arah yang lebih pendekatan antar organisasi, multi-level dan lintas-sektoral, yaitu sering diperlukan untuk menangani masalah yang ada (Ansell dan Gash, 2007; Ansell, 2012). Pada saat yang sama, itu bukan obat mujarab universal karena sering memakan waktu dan mungkin memiliki biaya transaksi tinggi. Ketika keterlibatan dalam pembuatan kebijakan menjadi lebih luas, pemecahan masalah semakin sulit (Peters, 2005: 358). Lingkungan kelembagaan sangat penting untuk koordinasi praktik yang menargetkan masalah kebijakan publik yang kompleks karena mereka termasuk sistem hubungan luas di yurisdiksi yang berbeda area yang secara langsung dapat memengaruhi tujuan, struktur, dan hasil pengaturan kolaboratif (Bryson et al., 2006).

Pola kolaborasi yang telah dibentuk merupakan bentuk dasar untuk mendorong keikutsertaan setiap individu yang terlibat. Collaborative governance paling sesuai untuk keadaan yang membutuhkan kerja sama terus-menerus. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan potensi pariwisata berbasis *indigenous tourism* (DeSeve, 2007:50)

- a. *Network structure*
- b. *Commitment to common purpose*
- c. *Trust among the participants*
- d. *Governance*
- e. *Access to authority*
- f. *Distributive accountability / responsibility*
- g. *Information sharing*
- h. *Access to resources.*

#### **Pengembangan Potensi Pariwisata**

Pariwisata merupakan merupakan bentuk suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia. Definisi lain menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 10/2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu saat ini sudah menjadi trend dunia, banyak negara bergantung dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh Organisasi Non-Pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal.

Pengaruh proses globalisasi ekonomi, sosial dan politik pariwisata telah menjadi satu dari industri terkemuka di banyak negara. Menurut data dari World Tourism Organisasi



(WTO), pariwisata, yang memiliki dampak langsung dan tidak langsung pada ekonomi, dalam skala global menciptakan 9% PDB, 1 dari 11 pekerjaan, 6% dari ekspor dunia, dan memperkirakan peningkatan internasional wisatawan hingga 1,8 miliar selama 2030. Selama dekade terakhir, pariwisata telah menjadi ekonomi yang penting. WTO mendefinisikan pariwisata sebagai jenis perjalanan, wisata, ketika seseorang meninggalkan pekerjaan dan tempat tinggalnya selama lebih dari satu hari dan kurang dari 12 bulan, dan tujuan perjalanan bukanlah perekrutan atau pembayaran kegiatan ([www.unwto.org](http://www.unwto.org)). Untuk semua negara, menyambut turis adalah salah satu yang paling penting kondisi untuk melestarikan dan mengembangkan identitas nasional mereka. Sharpley dan Telfer (2002) menyatakan bahwa pariwisata memiliki dampak langsung terhadap nasional, ekonomi regional dan lokal, sedangkan pengembangan pariwisata berpotensi menguntungkan ekonomi efek, yang pada gilirannya secara positif mempengaruhi perkembangan ekonomi tujuan. Hall (2007) memiliki menyatakan bahwa pengembangan pariwisata memiliki tradisi baru pembangunan berkelanjutan, terbentuk pada akhirnya dekade. Faktor-faktor yang mempengaruhi pariwisata di wilayah Lituania dan Latvia sebagian besar memberikan citra tujuan wisata / kesadaran, kualitas layanan pariwisata, manajemen tujuan wisata, variasi layanan pariwisata dan infrastruktur pariwisata (Narkūnienė, Gražulis, Arbidane; 2017).

Seperti yang dikatakan oleh Ap (1992); Latkova (2012) bahwa tuan rumah dalam hal ini masyarakat lokal memainkan peran penting dalam mengembangkan kesehatan dan industri pariwisata yang sejahtera. Industri pariwisata di wilayah mana pun bisa tumbuh dan berkembang saat itu penduduk setempat memiliki sikap positif terhadapnya dan kapan mereka merasa memiliki peran dalam proses pariwisata perencanaan, pengembangan, dan manajemen. Sehingga, penduduk setempat dan pemerintah di setiap tahap perencanaan dan pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata merupakan

salah satu proses untuk memahami perubahan fisik yang disebabkan oleh meningkatnya minat wisatawan di daerah tersebut dan ungkapan minat ini pada kinerja meningkatkan lalu lintas masuk Menurut Ligeikiene (2003) pengembangan pariwisata dapat dipandang sebagai asumsi untuk peningkatan kualitas hidup wisatawan dan masyarakat setempat. Tujuan pengembangan pariwisata dalam struktur ekonomi secara keseluruhan berdampak dan terkait dengan strategi cabang ekonomi lainnya, tindakan dan tindakan mereka, dan sektor publik, seperti perlindungan lingkungan, transportasi, pertanian, daerah, pengembangan kecil dan menengah bisnis.

### *Local Indegenous*

Pariwisata memang tidak hanya sekadar kegiatan ekonomi semata; itu adalah fenomena yang kompleks dan dinamis, karena hadir di hampir setiap sudut dunia dan mempengaruhi cara hidup banyak orang. Dampak sosiokultural dari pariwisata, terutama di negara-negara berkembang kemungkinan hal yang sangat dikhawatirkan, aspek dari sektor global yang teridentifikasi menawarkan paket potongan harga untuk jarak jauh dan tujuan eksotis. Pariwisata memengaruhi cara praktik budaya dan bentang alam terbentuk, dan perubahan budaya mencerminkan pengaruh pariwisata sebagai salah satu agen dalam transformasi tempat. Tantangan pembangunan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan maka kesuksesan tidak boleh dianggap sebagai hasil statis. Fakta bahwa faktor eksternal serta faktor-faktor internal dapat mengganggu pariwisata yang terkuat dan tersukses sekalipun harus membuat kita berhati-hati (Matarrita-Cascante, Brennan, & Luloff, 2010).

Pada pembahasan indigenos tourism dari sisi antropologi merupakan aspek yang saling terkait 'habitat (pengaturan geografis), warisan (Tradisi etnografi), sejarah (efek akulturasi) dan kerajinan tangan yang dapat dijual. Sehingga tantangan dari Indigeous Tourism adalah mempertahankan indigeneous pada masyarakat serta perlu mempersiapkan diri supaya tidak terseret pada eksploitasi karena saat ini industri



global mengambil alih kendali produk pariwisata apapun itu jenisnya (Liu dan Lu; 2014). Rasio wisatawan dengan penduduk bisa lebih besar dari beberapa ratus kali lipat, menunjukkan itu permintaan akan pariwisata asli sangat penting. Itu kerumunan menyuntikkan uang ke dalam ekonomi lokal. Demikian, banyak komunitas Aborigin berharap untuk meningkatkannya lingkungan ekonomi melalui pengembangan pariwisata, sementara lembaga pemerintah juga mendorong langkah-langkah yang mempromosikan pariwisata untuk memperluas pasar pariwisata asli dan meningkatkan standar hidup masyarakat adat (Butler dan Hinch 2007; Whitford dan Ruhanen 2010). Namun hubungan keduanya pertumbuhan pariwisata dan pembangunan ekonomi masyarakat adat orang masih kontroversial (Weaver 2009).

Kegiatan pariwisata memang dapat memberikan dampak positif bagi penduduk asli masyarakat, dengan dampak-dampak ini terutama berasal insentif ekonomi langsung dan tidak langsung dari wisatawan pengeluaran. Sebagai contoh manfaat langsung yang dihasilkan dari kegiatan pariwisata, baik jumlah yang dipekerjakan pribumi orang dan pendapatan dapat ditingkatkan (Strickland-Munro dan Moore 2013). Pentingnya budaya tradisional dan Tanah Suci dari penduduk asli mungkin meningkat sebagai akibat dari kebutuhan pariwisata; oleh karena itu, ini pertimbangan menerima lebih banyak perhatian dan bisa lebih banyak diawetkan dengan baik (Smith et al. 2009). Ekologis lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati di daerah hidup tradisional masyarakat adat dapat menerima perlindungan yang lebih memadai melalui infus sumber daya keuangan untuk konservasi karena pariwisata mengaktifkan (Nurse-Bray dan Rist 2009; Scherl dan Edwards 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah '*indigenous tourism*' telah menjadi kajian akademisi atau penulis bidang pariwisata melalui publikasi ilmiah baik jurnal maupun buku rujukan ilmiah khususnya karya ilmiah berbahasa

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

Inggris (Goodwin 2007, Ryan 2005, Sinclair 2003, Weaver 2010). Dapat dikatakan bahwa istilah *indigenous tourism* bukanlah istilah baru jika dilihat dari publikasi-publikasi ilmiah tersebut. Penulis mencoba mencari persamaan arti yang tepat yang mungkin dapat digunakan dalam konteks bahasa Indonesia yang mengacu pada istilah *indigenous tourism*. *Indigenous* dapat diartikan sebagai pribumi, keaslian atau yang asli. *Indigenous* sering dikaitkan dengan *cultural* dan *heritage tourism* yang saat ini menjadi penguatan potensi pariwisata yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat. *Indigenous tourism* muncul dan dapat menjadi alternatif bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata yang berbasis pada budaya asli masyarakat (*cultural*) dan warisan sejarah (*heritage*) yang masih terjaga dengan baik di masyarakat.

Isu keanekaragaman budaya dan upaya konservasi warisan sejarah kini mulai mendapat perhatian serius warga dunia pada pergantian abad ini. Indonesia yang multietnis, multibahasa sekaligus multibudaya jelas memberikan begitu banyak warisan kekayaan seni dan budaya yang bermultiragam bentuknya. Adanya pengakuan dari UNESCO adalah bukti pengakuan mereka terhadap keberadaan entitas multikultural Indonesia sekaligus capaian kekayaan masalah bangsa ini yang masih lestari hingga sekarang. Pengakuan dan pengesahan UNESCO semakin memiliki arti penting, mengingat beberapa tahun lalu negeri kita sempat heboh karena muncul kasus klaim Malaysia terhadap eksistensi Tari Pendet dan Tari Reog. Langkah signifikan klaim terhadap budaya menjadi sangat penting, mengingat klaim warisan budaya mempunyai korelasi terhadap pertumbuhan ekonomi. WTO bahkan menegaskan bahwa sektor pariwisata telah menjadi industri yang prospektif dan kompetitif di abad 21.

Data dari Pacifik Asia Travel Association (PATA) menunjukkan bahwa jumlah kunjungan internasional ke wilayah Asia Pasifik tumbuh rata-rata 2,2% pada tahun 2009, meleset dari dugaan diasumsikan minus 4% karena krisis ekonomi global. Asia Tenggara mencatat



pertumbuhan paling fantastis yaitu rata-rata 7%, dengan distribusi ke Malaysia (+14%), Thailand (+11%) dan Indonesia (+3%). Sedangkan daya saing pariwisata Indonesia, menurut World Economic Forum yang mempublikasikan The Travel and Tourism Competitiveness Report 2009 – 2010, posisi kita berada pada peringkat ke-81 dari 133 negara. Masih jauh di bawah Singapura (10), Malaysia (32) dan Thailand (39). Lima tahun kemudian, peringkat Indonesia berhasil naik tajam. The Global Competitiveness Report 2014 – 2015 mencatat Indonesia berada pada posisi 34. Namun posisi ini secara ranking global masih tetap kalah jauh dibandingkan posisi Singapura (2), Malaysia (20) dan Thailand (31).

Data mengenai kedatangan wisatawan asing ke Indonesia masih jauh berada di bawah angka statistik yang berhasil dicapai ketiga negara itu. Data menurut Giri (2015), Indonesia mencatat kedatangan wisatawan asing sebesar kurang-lebih 8,04 juta; Malaysia 25,03 juta; Thailand 22,3 juta; dan Singapura 14,5 juta pada tahun 2012. Dan pada tahun 2014, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia naik menjadi 9,43 juta; Malaysia 27 juta; Thailand 24,77 juta; dan Singapura 15,56 juta.

Ini menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian bagi pemerintah Indonesia, mengingat tujuan wisata Indonesia lebih banyak dan beragam dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, maupun Singapura. Dengan mengingat karakter multietnis dan multibudaya Indonesia plus kekayaan panorama alamnya seharusnya Indonesia dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi datangnya tamu asing. Menurut Giri (2015) salah satu penyebabnya yaitu kebijakan bebas visa untuk kunjungan pariwisata. Malaysia telah membebaskan visa bagi 164 negara dan Thailand bagi 56 negara. Sementara Pemerintah Indonesia baru-baru saja mengeluarkan kebijakan bebas visa kunjungan bagi 75 negara, menambah 15 negara yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Selain itu, buruknya infrastruktur atas kemudahan aksesibilitas pariwisata sering menjadi keluhan utama para wisatawan mancanegara. Banyaknya objek wisata yang masih belum dikenal oleh masyarakat luas, juga

menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah dalam rangka memperkenalkan objek - objek wisata yang ada di Indonesia. Masih minimnya tingkat promosi menjadi kendala pemerintah dalam memperkenalkan pariwisata lokal ke luar negeri, terutama objek wisata yang berada di daerah pelosok yang jauh dari ibu kota dan kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Oleh karenanya, Adanya undang-undang NO 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Kepres 22 tahun 2011, Kemenpan No 69 tahun 2010. Terbitnya kebijakan pemerintah tersebut merupakan usaha pemerintah pusat dalam rangka membuka peluang sektor pariwisata nasional dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Melalui payung hukum / regulasi tersebut maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berupaya keras dalam mengembangkan sektor pariwisata melalui potensi pariwisata yang ada, utamanya pada pengembangan pariwisata yang berbasis pada Indigenous Tourism. Hal ini dikarenakan potensi dibidang tersebut merupakan unggulan pariwisata yang orisinal atau asli yang menggambarkan tentang cultural dan heritage tourism yang berdaya saing bagi pengembangan pariwisata di Indonesia.

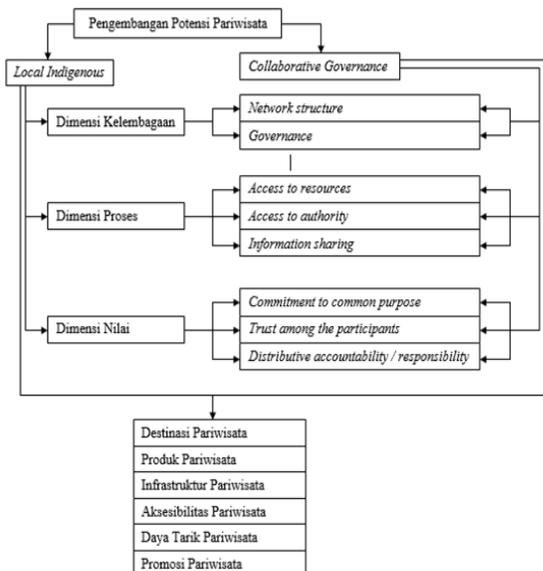
Peran penting dalam pengembangan potensi pariwisata berbasis indigenous tourism, bukan hanya pada peran pemerintah pusat ataupun daerah, tetapi melainkan peran keseluruhan aktor yang berada didalam masyarakat pariwisata yang memiliki peran penting dalam menumbuh kembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini mampu diwujudkan apabila kerjasama keseluruhan aktor masyarakat pariwisata dapat terlaksana dengan baik, atau dengan istilah lain terwujudnya *Collaborative Governance* di sektor pariwisata. *Collaborative* atau kolaborasi berarti bekerja bersama atau bekerja sama dengan orang lain. Ini menyiratkan baik aktor maupun individu, kelompok atau organisasi bekerjasama dalam beberapa kegiatan. (O'Flynn & Cinta, 2000); *collaborative governance* menurut (Ansell dan Gash, 2007), sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga-lembaga publik bersama aktor non Negara dan pemangku kepentingan



terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif yang bersifat formal, berorientasi consensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program publik atau asset.

Pengembangan potensi pariwisata berbasis *indigenous tourism* merupakan kajian yang penting untuk melestarikan dan mengembangkan identitas nasional pada suatu wilayah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pariwisata memiliki dampak langsung terhadap nasional, ekonomi regional dan lokal, sedangkan pengembangan pariwisata berpotensi dalam hal peningkatan kualitas pariwisata yang ditunjang melalui pengembangan destinasi, produk, infrastuktur, aksesibilitas, daya tarik, dan promosi pariwisata melalui upaya *collaborative governance*.

**Gambar 1. Model Collaborative Governance dalam Pengembangan Indigenous Tourism**



#### DAFTAR PUSTAKA

[1] Ap, J. (1992). Residents' perception of tourism impacts. *Annals of Travel Research*, 49(4), 665-690.  
[2] Angelidou, M. (2014). Smart city policies: A spatial approach. *Cities*, 41, S3-S11.

[3] Ansell, C. (2012) 'Collaborative Governance', in D. Levi-Faur (ed.), *Oxford Handbook of Governance*, Oxford and New York: Oxford University Press, 498–511.  
[4] Ansell, C. and A. Gash (2007) 'Collaborative Governance in Theory and Practice', *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, 543–71.  
[5] Albino, V., Berardi, U., & Dangelico, R. M. (2015). Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives. *Journal of Urban Technology*, 22(1), 3-21.  
[6] Bensman, David. 2014. Missclassification: Workers in The Borderland. *Journal of Self-Governance & management Economics*. 2(2). 7-25.  
[7] Bifulco, F., Tregua, M., Amitrano, C. C., & D'Auria, A. (2016). ICT and sustainability in smart cities management. *International Journal of Public Sector Management*, 29(2), 132-147.  
[8] Bryson, J.M., B.C. Crosby and M.M. Stone (2006) 'The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature', *Public Administration Review*, 66(1), 44–55.  
[9] Bozeman, B. (2002), "Public-value failure: when efficient markets may not do", *Public Administration Review*, Vol. 62 No. 2, pp. 145-61.  
[10] Butler R, Hinch T (2007) Introduction: revisiting common ground. In: Butler R, Hinch T (eds) *Tourism and indigenous peoples: issues and implications*. Butterworth-Heinemann, London, pp 1–14  
[11] Callahan, K. (2007), "People, politics, participation, and place", *Public Administration Review*, Vol. 67 No. 5, pp. 950-4.  
[12] Canitez, Fatih dan Muhammet Deveci. (2018). A Smart City Assessment Framework: The Case Of Istanbul's Smart City Project. 32nd International Scientific Conference on Economic and Social Development.



- [13] Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). Smart cities in Europe. *Journal of urban technology*, 18(2), 65-82.
- [14] Dollery, B. (2003), "A critical evaluation of virtual local government in Australia", *Australian Journal of Public Administration*, Vol. 62 No. 3, pp. 82-91.
- [15] Dredge, D., Jenkins, J. (2007). *Tourism planning and policy*. Brisbane: Wiley.
- [16] Geddes, M. (2005), "International perspectives and policy issues", in Smyth, P., Reddel, T. and Jones, A. (Eds), *Community and Local Governance in Australia*, University of New South Wales Press, Sydney, pp. 13-34.
- [17] Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovic, N., & Meijers, E. (2007). *Smart cities. Ranking of European medium-sized cities*, Final Report, Centre of Regional Science, Vienna UT.
- [18] Grindle, M.S. (2004), "Good enough governance: poverty reduction and reform in developing countries", *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, Vol. 17 No. 4, pp. 525-48.
- [19] Hall, C. M. (2007). *Tourism and regional competitive ness*. *Advances in Tourism Research*, p. 217—230.
- [20] Hartley, J., E. S.rensen and J. Torfing (2013) 'Collaborative Innovation: A Viable Alternative to Market Competition and Organizational Entrepreneurship', *Public Administration Review* , 73(6), 821–32
- [21] Holzer, M. and Kloby, K. (2005), "Public performance measurement an assessment of the state-of-the-art and models for citizen participation", *International Journal of Productivity and Performance Management*, Vol. 54 No. 7, pp. 517-32.
- [22] Hope, K.R. Sr (2009), "Capacity development for good governance in developing countries: some lessons from the field", *International Journal of Public Administration*, Vol. 32 No. 8, pp. 728-40. Palgrave
- [23] Johnston, E. W., & Hansen, D. L. (2011). Design lessons for smart governance infrastructures. *Transforming American governance: Rebooting the public square*, 197-212.
- [24] Jones, S., Hackney, R. and Irani, Z. (2007), "Towards e-government transformation: conceptualising 'citizen engagement': a research note", *Transforming Government: People, Process and Policy*, Vol. 1 No. 2, pp. 145-52.
- [25] Kanat, I.E. and Ozkan, S. (2009), "Exploring citizens' perception of government to citizen services: a model based on theory of planned behaviour (TPB)", *Transforming Government: People, Process and Policy*, Vol. 3 No. 4, pp. 406-19.
- [27] Lamongankab.go.id. 2014. Visi dan Misi. <https://portal.lamongankab.go.id/2013-01-30-19-30-20/visi-kab-lamongan.html> diakses pada tanggal 23 Mei 2019 jam 21.56 WIB.
- [28] Læg Reid, Per , Tiina Randma-Liiv, Lise H. Rykkja dan Külli Sarapuu.2014. *Introduction: Emerging Coordination Practices in European Public Management*. Palgrave Macmillan: London.
- [29] Lee, J. H., Hancock, M. G., & Hu, M. C. (2014). Towards an effective framework for building smart cities: Lessons from Seoul and San Francisco. *Technological Forecasting and Social Change*, 89, 80-99.
- [30] Ligeikienė, R. (2003). *Turizmo plėtra ir valdymas (Daktaro disertacija, Kauno technologijos universitetas)*.
- [31] Liu, Tzu-Ming dan Dau-Jye Lu.2014. *The Cultural and Egoical Impacts of Aboriginal Tourism: a case study in On Taiwan's Tao Tribe*. Springer Plus.3[347].
- [32] Macintosh, A. and Whyte, A. (2008), "Towards an evaluation framework for e-participation", *Transforming Government: People, Process and Policy*, Vol. 2 No. 1, pp. 16-30.
- [33] Mahmud, S. (2004), "Citizen participation in the health sector in rural Bangladesh:



- perceptions and reality”, *IDS Bulletin*, Vol. 35 No. 2, pp. 11-18.
- [34] Matarrita-Cascante, D., Brennan, M.A., & Luloff, A.E. (2010). Community agency and sustainable tourism development: The case of La Fortuna, Costa Rica. *Journal of Sustainable Tourism*, 18(6), 735–756.
- [35] Mooij, J. E. (2003). *Smart Governance?: Politics in the Policy Process in Andhra Pradesh, India*. London: Overseas Development Institute.
- [36] Muñoz, P. and Cohen, B. (2017) Mapping out the sharing economy: A configurational approach to sharing business modeling, *Technological Forecasting and Social Change*, DOI: 10.1016/j.techfore.2017.03.035.
- [37] Narkūnienė, Ramutė ; Vladimiras Gražulis dan Iluta Arbidane. 2017. Tourism Development Conditions In The Municipalities of Lithuania and Latvia Regions. CBU INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION. Prague.
- [38] Navarra, D.D. and Cornford, T. (2005), “ICT, innovation and public management: governance, models & alternatives for e-government infrastructures”, paper presented at the 13th European Conference of Information Systems, Regensburg, May 26-28.
- [39] Peters, B.G. (2005) ‘The Problem of Policy Problems’, *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice* , 7(4), 349–70.
- [40] Reinhold, Stephan dan Sara Dolnicar. 2018. *The Sharing Economy*. Goodfellow Publishers Limited: Oxford
- [41] Roche, S. (2014). Geographic Information Science I: Why does a smart city need to be spatially enabled?. *Progress in Human Geography*, 38(5), 703-711.
- [42] Sharpley, R., Telfer, D. J. (2002) *Tourism development. Concepts and issues*. Cambrian printers Ltd.
- [43] Sobol, A. (2008), “Governance barriers to local sustainable development in Poland”, *Management of Environmental Quality: An International Journal*, Vol. 19 No. 2, pp. 194-203.
- [44] Stoker, G. (2006), “Public value management: a new narrative for networked governance?”, *American Review of Public Administration*, Vol. 36 No. 1, pp. 41-57
- [45] Neo, Boon Siong dan Geraldine Chen. 2007. *Dynamic Governance Embedding Culture, capabilities and Change in Singapore*. Danvers: World Scientific Publishing Co.,Pte.,Ltd.
- [46] Neirotti, P., De Marco, A., Cagliano, A. C., Mangano, G., & Scorrano, F. (2014). Current trends in Smart City initiatives: Some stylised facts. *Cities*, 38, 25-36.
- [47] Niaros, V., Kostakis, V., & Drechsler, W. (2017). Making (in) the smart city: The emergence of makerspaces. *Telematics and Informatics*.
- [48] Weiss, Thomas G. 2000. Governance, good governance and global governance: conceptual and actual challenges. *Third World Quarterly: ProQuest*. 21[5].pg 795
- [49] Thomson, Ann Married an James L. Perry (2006). *Collaboration Processes: Inside The Black Box*. *Public Administration Review*. 66[1]: 20-32.
- [50] Trapnell, Stephanie. 2013. Measurement of governance, government and the public sector. <https://blogs.worldbank.org/governance/measurement-of-governance-government-and-the-public-sector> pada tanggal 22 Mei 2019 jam 21.22 WIB.
- [51] Kunasekaran, Puvaneswaran, Nurul Izatul Natasya Rozak, Syamimi Mohd. Adam, dan Ahmad Shuib. 2018. Perception of Local Communities on The Indicators of Governance in Tanjung Piai National Park. *International Journal of Business and Society*. 19[SI].pg 79-87.
- [52] Kutra, Marta Strumińska. 2018. *Democratizing Public Management Toward Practice-based Theory*. Palgrave Macmillan. Cham. Zwitterland.



- [53] Latkova, P., & Vogt, C. A. (2012). Resident attitude toward existing and future tourism development in rural communities. [54] *Journal of Travel Research*, 51(1), 50-67
- [55] Jessop, Bob. 2011. Metagovernance. In *The Sage Handbook of Governance*, 106–123. London: Sage Publications.
- [56] Nursey-Bray M, Rist P (2009) Co-management and protected area management: [57] achieving effective management of a contested site, lessons from the Great [58] Barrier Reef World Heritage Area (GBRWhA). *Mar Policy* 33:118–127
- [59] Scherl LM, Edwards S (2007) Tourism, indigenous and local communities and [60] protected areas in developing nations. In: Bushell R, Eagles PFJ (eds) *Tourism [61] and protected areas: benefits beyond boundaries*. CAB International, [62] Wallingford, pp 71–88
- [63] Sirker, K. and Cosic, S. (2007), *Empowering the Marginalized: Case Studies of Social Accountability Initiatives in Asia*, World Bank Institute, Washington, DC.
- [64] Smith AJ, Scherrer P, Dowling R (2009) Impacts on Aboriginal spirituality and [65] culture from tourism in the coastal waterways of the Kimberley region, [66] North West Australia. *Journal of Ecotourism* 8:82–98
- [67] Sullivan, H. (2001), “Modernisation, democratisation and community governance”, *Local Government Studies*, Vol. 27 No. 3, pp. 1-24.
- [68] Strickland-Munro J, Moore S (2013) Indigenous involvement and benefits from [69] tourism in protected areas: a study of Purnululu National Park and Warmun [70] Community, Australia. *J Sustain Tour* 21:26–41
- [71] Uzzaman, Wahed. 2010. Value of People’s Participation for Good Governance in Developing Country. *Transforming Government: People, Process and Policy*. Emerald Group Publishing Limited. 4[4]. pg.386-402.
- [72] Weaver D (2009) Indigenous tourism stages and their implications for [73] sustainability. *J Sustain Tour* 18:43–60
- [74] Whitford MM, Ruhanen LM (2010) Australian indigenous tourism policy: practical [75] and sustainable policies? *J Sustain Tour* 18:475–496
- [76] Yin, Robert K. 2011. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.